

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan empat variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) dan satu variabel dependen (kinerja keuangan) pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,026 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 ($p < 0,05$). Hal ini karena pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang seimbang, sehingga hasilnya bisa bebas dimanfaatkan oleh pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawai.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,294 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,770 ($p > 0,05$). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai belanja rutin pegawai.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,425 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Hal tersebut dikarenakan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga hasilnya bisa langsung digunakan pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawainya.
4. Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 0,807 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,424 ($p > 0,05$). Hal tersebut dikarenakan penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak bersifat tetap, salah satu contohnya hasil penjualan aset daerah, tidak setiap bulan atau tahun suatu pemda melakukan penjualan aset daerahnya, sehingga lain-lain PAD yang sah tidak bisa dijadikan penerimaan tetap untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawai.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti antara lain:

1. Masih menggunakan peraturan dan undang-undang yang lama.

2. Hanya menggunakan periode waktu selama tiga tahun saja dan dengan sampel yang terbatas yaitu 18 kabupaten/kota.
3. Hanya menggunakan satu pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah

C. Saran

Dari hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar disesuaikan menggunakan peraturan dan undang-undang yang baru
2. Menambahkan jumlah sampel dan periode waktu penelitian.
3. Menambah pendekatan lain dalam mengukur kinerja keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 06. No. 02. Agustus 2005: 105-124.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Provinsi di DIY)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 10. No. 1. Februari 2009: 1900-1910.
- Florida, Asha. 2006. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Utara. *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Tiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad, Sulistyowat, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 2007. Yogyakarta: BPFE
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDI-RUKMANA-090462201374-Akuntansi-2013.pdf>. May 22, 2014.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Selatan". *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 02. No. 01. September 2012. Hal 39-51.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Realisasi PAD dan Belanja Rutin Non Pegawai tahun 2010
- Lampiran 2 Data Realisasi PAD dan Belanja Rutin Non Pegawai tahun 2011
- Lampiran 3 Data Realisasi PAD dan Belanja Rutin Non Pegawai tahun 2012
- Lampiran 4 Output SPSS 17